



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Arahan Juliari Usai OTT
Tanggal : Rabu, 02 Juni 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2



PERSIDANGAN Terdakwa mantan menteri sosial Juliari Peter Batubara menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial Covid-19, di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat, Senin (31/5).

Arahan Juliari Usai OTT

■ DIAN FATH RISALAH

K uasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial, Adi Wahyono sempat bertanya-tanya ketika pintu kamarnya diketok pada Ahad, 6 Desember 2020. Saat itu, ia tengah menginap di sebuah hotel setelah menemani Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyerahkan bantuan ke pondok pesantren dan pengarahan pendamping program keluarga harapan (PKH) di Malang, Jawa Timur.

"Pagi jam 7 saya dibangunkan, diketok. Saya di Malang saat hotel dengan Pak Menteri," kata Adi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (31/5). Adi menjadi saksi untuk terdakwa Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos Covid-19.

"Untuk apa (dibangunkan)?" tanya Jaksa KPK M Nur Azis. "Karena ada berita itu (OTT KPK)," jawab Adi.

Juliari, kata dia, langsung mengumpulkan sejumlah pejabat Kemensos di kamar hotelnya, tak lama usai mencuat berita operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTK KPK) terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso,

5 Desember 2020. Adi mengungkapkan, beberapa pejabat yang dikumpulkan adalah Dirjen Linjamsos Peper Nazarudin, Karo Perencanaan Kemensos Adi Karyono, dan Staf Ahli Mensos Kukuh Ariwibowo, dan lainnya.

Arahan pertama Juliari adalah meminta para pejabat itu mencari semua informasi yang berkaitan dengan OTT KPK tersebut. Ia bahkan diminta menelepon Ketua Komisi III DPR Herman Hery.

Mulanya, Adi mengaku, pemangilan itu hanya sebatas mencari informasi tersebut. Dari arahan Juliari, ia akhirnya sadar kasus itu terkait pengadaan bansos. Adi pun mengaku pasrah. "Ya aduhannya, ya semua harus kalau bahasa saya ini sudah kesalahan. Kalau saya sangat menyadari ini menyengut saya, saya menjalankan perintah yang seharusnya tidak saya lakukan. Jadi saya pasti ditahan, saya menyadari," kata Adi.

Tidak hanya itu, Juliari juga meminta penyalaman dirinya. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Adi, disebutkan adanya arahan dari Juliari untuk tidak menyeret namanya dalam kasus dugaan korupsi bansos. Dalam kamar hotel tersebut, Juliari meminta mereka mengatakan tidak ada arahan dari menteri.

Adi mengatakan, Juliari juga

meminta hal yang sama saat bertemu dirinya ketika perpanjangan penahanan di KPK. "Saat itu, saya diminta agar menyampaikan tidak ada perintah dari yang bersangkutan," kata Adi.

Padahal, Adi mengaku, telah menerima arahan Juliari untuk pemotongan Rp 10 ribu per paket bansos. Juliari juga melakukan evaluasi berkala terkait jumlah penerimaan fee tersebut.

"Setiap saat saya bisa dipanggil, beliau (Juliari Batubara) minta laporan atau perintah penerimaan, pengeluaran untuk uang yang dikumpulkan PPK (pejabat pembuat komitmen)," kata Adi. Laporan itu berbentuk metrik yang isinya daftar perusahaan penyedia, jumlah kuota, jumlah fee yang sudah dikumpulkan.

Juliari disebut selalu mempertanyakan mengapa ada perusahaan yang tidak memberikan. "Beliau (Juliari) sangat serius evaluasi kenapa yang ini tidak memberikan," ungkap Adi. Menurut dia, Juliari meminta semuanya berkontribusi operasional dirinya.

"Akan tetapi, saya tidak bisa memaksa juga karena itu (penyerahan fee) melanggar undang-undang," kata Adi. Dalam dakwaan disebutkan uang fee yang sudah diterima Juliari sebesar Rp 14,7 miliar. ■ ed: ihlam tirta